

BAB V

ANALISA HASIL PENELITIAN

Bab kelima ini akan menganalisis tentang kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pembahasan ini terdiri dari tiga sub, yaitu : (1) Kemampuan Dasar, (2) Kemampuan Manajemen, (3) Kemampuan Teknis. Namun sebelum kita membahas itu maka perlu kita ketahui terlebih dahulu bagaimana proses dan sumber ADD yang diterima oleh desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa unsur penting dalam kedua Undang-Undang ini. Artinya keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Jadi Gubernur, Bupati, atau Walikota harus lebih bertanggungjawab kepada rakyat di daerah. Pemerintah daerah diberi otonomi yang lebih luas dalam membiayai dan pengelolaan pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran. Dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di

bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari pemerintah kabupaten/kota, yang bersumber dari bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota minimal sebesar 10% untuk desa dan penyalurannya melalui Kas Desa/ Rekening Desa.

A. Kemampuan Dasar

Aspek kemampuan Dasar merupakan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh melalui proses belajar dalam Bimtek. Kemampuan dasar mempunyai dua indikator yaitu : 1) Memiliki pengetahuan dasar bagi pemerintahan desa lewat BIMTEK tentang pengelolaan keuangan ADD, 2) Memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan pemerintah desa.

A.1. Memiliki Pengetahuan Dasar Bagi pemerintah Desa Lewat Bimtek Tentang Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)

Kinerja pemerintah desa merupakan hasil interaksi yang kompleks dan agregasi kinerja sejumlah individu (perangkat desa). Pencapaian kinerja dipengaruhi kemampuan dan motivasi. Determinan kemampuan adalah pengetahuan dan keterampilan. Sementara motivasi ditentukan oleh faktor sikap dan situasi lingkungan kerja. Pengetahuan pemerintah desa dapat diukur melalui

tingkat pendidikan atau pelatihan ataupun bimbingan teknis (BIMTEK). Untuk itu, kepala desa dan perangkatnya mesti lebih meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berbagai kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis (BIMTEK).

Berdasarkan pendapat dari informan yang ada, dinyatakan bahwa pengetahuan dasar dan kemampuan Aparat Desa Kletek tentang pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) sangat rendah. Kondisi ini terjadi karena aparat pemerintah desa belum pernah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis khusus tentang pengelolaan keuangan alokasi dana desa, yang akhirnya berimbas pada kurang maksimalnya pengelolaan keuangan alokasi dana desa (ADD) itu sendiri. Kegiatan bimbingan teknis (BIMTEK) khusus tentang pengelolaan keuangan desa yang tidak pernah diikuti merupakan akibat lanjut dari tidak adanya alokasi anggaran dalam Alokasi Dana Desa. Jalan keluar yang diambil adalah kepala desa dan aparat pemerintah desa lainnya bersepakat secara bersama-sama untuk membaca dan memahami Petunjuk Teknis (Juknis) tentang Tata kelola Alokasi Dana Desa.

Untuk mendeskripsikan Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagai upaya peningkatan Kemampuan dan pengetahuan dasar Pemerintah Desa tentang pengelolaan keuangan ADD di Desa Kletek, Penulis melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan sebagai berikut :

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Yoseph Luis Atok selaku Kepala Desa Kletek, ia mengatakan bahwa :

Pengetahuan dasar tentang pengelolaan keuangan ADD di Desa Kletek ini sangat rendah. Mengapa saya katakan demikian, karena selama ini Aparatur

Desa Kletek belum pernah mengikuti kegiatan bimbingan teknis (BIMTEK) tentang pengelolaan keuangan desa karena tidak adanya alokasi dana desa khusus untuk kegiatan Bimtek pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Solusi untuk mengatasi kurangnya pengetahuan kami tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, maka saya selaku kepala desa dan aparat pemerintah desa lainnya bersepakat secara bersama-sama untuk membaca dan memahami petunjuk teknis pengelolaan Alokasi Dana Desa khusus tentang Tata kelola Alokasi Dana Desa dan berkonsultasi secara langsung dengan bidang teknis di kecamatan terkait khususnya tentang pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Memang sejauh ini pengelolaan Alokasi Dana Desa seperti perencanaan keuangan desa, proses penganggaran, struktur APBDes dan perubahan APBDes yang kami lakukan belum maksimal, namun selaku kepala desa yang mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan desa, saya harus berusaha semaksimal mungkin agar pengelolaan Alokasi Dana Desa seperti perencanaan keuangan desa, proses penganggaran, struktur APBDes dan perubahan APBDes, bisa berjalan sesuai dengan Petunjuk Teknis tentang Tata Kelola Alokasi Dana Desa¹

Dalam pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Afelinus Leki selaku Kaur Keuangan Desa Kletek, beliau mengatakan bahwa :

Pengetahuan dasar tentang bimbingan teknis (Bimtek) bagi kami perangkat desa sangat rendah. Karena kami sebagai perangkat desa belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan mengenai bimbingan teknis (Bimtek) yang dilakukan oleh dinas. Namun kami bersama kepala desa dan teman aparat desa lainnya mencari jalan keluarnya yaitu dengan membaca petunjuk teknis (Juknis) tentang tata kelola alokasi dana desa².

Hal serupa hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bapak Stefanus B. Leto selaku Kaur Pembangunan Desa Kletek, beliau mengatakan bahwa :

Kami selaku aparat pemerintah desa sampai saat ini belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini selain karena tidak adanya alokasi dana desa yang diperuntukkan untuk kegiatan Bimtek tetapi kami aparat desa dan kepala desa mencari jalan keluar dengan membaca dan memahami petunjuk teknis (Juknis) tentang tata kelola alokasi dana desa³.

¹Wawancara dengan Bapak Yoseph Luis Atok selaku Kepala Desa Kletek, tanggal 04 September 2019

² Wawancara dengan Afelinus Leki selaku Kaur Keuangan Desa Kletek, tanggal 04 September 2019

³ Wawancara dengan Bapak Stefanus B. Leto selaku Kaur Pembangunan Desa Kletek, tanggal 04 September 2019

Pernyataan yang hampir sama menurut Bapak Clemens Leki selaku Ketua BPD Desa Kletek, ia mengatakan bahwa :

Mengenai pelatihan bimbingan teknis, sebenarnya sejauh ini pemerintah desa Kletek itu belum pernah mengikutinya sama sekali. Makanya dalam setiap pengelolaan keuangan desa itu kurang maksimal hasilnya. Hal ini sering menyebabkan program kerja yang ada di desa ini sering mengalami kendala⁴.

Hasil penelitian besaran ADD yang ada Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 368,738,000 digunakan untuk membiayai kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Bidang Pembinaan Masyarakat Desa. Dengan perincian sebagai berikut :

⁴ Wawancara dengan Bapak Clemens Leki selaku Ketua BPD Desa Kletek, tanggal 03 September 2019

Tabel 5.1
Besaran ADD Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah
Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018

No	Uraian Belanja		Anggaran (Rp)
1	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	- Belanja Pegawai	242.400.000
		- Operasional Perkantoran/Belanja Barang Dan Jasa	16.729.500
		- Operasional Badan Permusyawaratan Desa/Belanja Barang Dan Jasa	2.391.500
		- Operasional Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Belanja Barang Dan Jasa	72.600.000
		- Kegiatan Musyawarah Desa	7.867.000
		- Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Desa	900.000
		JUMLAH	
2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	- Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	15.600.000
		- Kegiatan pembinaan organisasi Perempuan/Tim Penggerak (TP)/Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa	5.000.000
		- Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan Kader Teknik Desa (KTD)	1.800.000
		- Kegiatan Perayaan HUT RI	3.450.000
		JUMLAH	
TOTAL 1 dan 2			368.738.000

Sumber : APBDes Desa Kletek Tahun 2018⁵

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ADD yang diberikan sebesar Rp 368.738.000, yang dipergunakan untuk 2 bidang kegiatan diantaranya Bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, ADD digunakan untuk membiayai kegiatan belanja pegawai, operasional perkantoran/belanja barang dan

⁵ Sumber : APBDes Desa Kletek Tahun 2018

jasa, operasional BPD/belanja barang dan jasa, Operasional Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/belanja barang dan jasa, kegiatan musyawarah desa dan, kegiatan penyelenggaraan pembangunan desa dengan total biaya sebesar Rp 342.888.000. Sedangkan dalam kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan ADD digunakan untuk membiayai kegiatan pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), pembinaan organisasi perempuan/tim penggerak (TP)/pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) Desa, kegiatan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMDD) dan kader teknik desa (KTD) dan kegiatan perayaan HUT RI dengan total biaya sebesar Rp 25.850.000. Berdasarkan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), Bimbingan Teknis berupa kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan desa (SISKUEDES) belum pernah diikuti oleh aparat pemerintah desa Kletek. Sedangkan dalam APBDes kegiatan pelatihan pengelolaan keuangan sebenarnya termasuk didalam bidang pembinaan kemasyarakatan. Namun dalam realisasinya pemerintah desa tidak memasukan kegiatan pengelolaan keuangan desa dalam uraian belanja bidang pembinaan kemasyarakatan. Hal ini dapat dibuktikan dari tabel diatas.

Berdasarkan hasil wawancara di atas membuktikan bahwa Aparat Pemerintah Desa Kletek belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Hal ini yang menyebabkan kurang pahamnya aparat pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan alokasi dana desa yang ada di Desa Kletek ini. Jalan keluar yang diambil adalah kepala desa dan aparat pemerintah desa lainnya bersepakat secara bersama-sama untuk

membaca dan memahami Petunjuk Teknis (Juknis) tentang Tata kelola Alokasi Dana Desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tabel 5.1 yang menerangkan bahwa dalam bidang pembinaan masyarakat tidak adanya alokasi dana desa untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan sistem keuangan desa.

A.2. Memiliki Pengetahuan Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dalam Menjalankan Pemerintah Desa.

Pemerintah desa memiliki tugas pokok dan fungsi yang menjadi salah satu aspek dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di pemerintah desa. Mulai dari kepala desa samapai kepala dusun semuanya memiliki tupoksinya masing-masing. Untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi dari pemerintah desa maka peneliti telah menjabarkan hasil wawancara antara peneliti bersama dengan informan. Adapun hasil wawancara bersama informan sebagai berikut :

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Yoseph Luis Atok selaku Kepala Desa Kletek, ia mengatakan bahwa⁶ :

Dalam pemerintah desa itu, tugas pokok dan fungsi itu merupakan sebuah tanggungjawab yang dibebankan kepada aparat desa dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat. Di desa kita ini semua aparat pemerintah desa telah mendapatkan pembagian tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Namun masih ada beberapa aparat desa yang belum dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya karena SDM yang dimiliki aparat desa tersebut sangat minim.

Hal serupa yang diungkapkan oleh Bapak Stefanus B. Leto selaku Kaur Pembangunan Desa Kletek, beliau mengatakan bahwa⁷ :

Tugas pokok dan fungsi untuk semua aparatur desa sudah ada jadwal piket setiap hari baik itu Pemerintah Desa maupun BPD. Namun dalam

⁶ Wawancara dengan Bapak Yoseph Luis Atok selaku Kepala Desa Kletek, tanggal 04 September 2019

⁷ Wawancara dengan Bapak Stefanus B. Leto selaku Kaur Pembangunan Desa Kletek, tanggal 04 September 2019

pelaksanaannya masih tumpang tindih. Masih banyak juga aparat desa yang tidak mengerti dengan tugasnya sendiri. Ada aparat desa yang tugasnya adalah melakukan pelayanan administrasi kepada masyarakat, namun seringkali ia tidak melakukan tugas tersebut karena ketidakpahaman mengenai pelayanan administrasi yang diberikan. Hal ini karena SDM Aparat Desa Kletek ini masih banyak yang sangat minim.

Pernyataan yang hampir sama menurut Bapak Clemens Leki selaku Ketua BPD Desa Kletek, ia mengatakan bahwa⁸

Mengenai tupoksi ini, saya katakan bahwa pemahaman perangkat desa dalam hal ini kepala desa bersama perangkatnya tentang tupoksi mereka sangat kurang sekali, sehingga selama ini saya lihat dalam pelaksanaan tugas ini masih tersendat. Dari sini saya melihat perangkat-perangkat desa yang ada, baik kaur maupun dusun yang ada belum efektif dalam menjalankan tugas mereka masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa yang menjadi salah satu permasalahan di Desa Kletek adalah dalam pembagian tugas pokok dan fungsi dari aparat desa masih tumpang tindih. Aparat Desa di Desa Kletek sudah dibagi dalam bidangnya masing-masing namun mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang sangat minim sehingga dalam pelaksanaannya aparat desa tidak bekerja sesuai dengan tupoksi yang telah dibagi.

B. Kemampuan Manajemen

Kemampuan manajemen merupakan proses perencanaan dan pengorganisasian sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Kemampuan manajemen mempunyai dua indikator yaitu : 1) Manajemen SDM, 2) Manajemen aset.

⁸ Wawancara dengan Bapak Clemens Leki selaku Ketua BPD Desa Kletek, tanggal 03 September 2019

B.1 Manajemen SDM

Pada dasarnya perangkat desa memiliki beban tugas untuk mengelola sumber daya. Peningkatan kemampuan perangkat desa, dapat dinilai dari segi kualitas maupun kuantitas. Tugas untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa, seperti proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban untuk mencapai hasil yang optimal menjadi tanggungjawab kepala desa dan sekretaris desa. sedangkan penguasaan SDM, bagi perangkat desa adalah bagaimana dapat meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya. Tingkat keikutsertaan perangkat desa dalam mengikuti diklat/bimtek dalam peningkatan kemampuan masih sangat rendah.

Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan mengenai manajemen SDM. Adapun penjabaran informan sebagai berikut :

Hal yang diungkapkan oleh Bapak Yoseph Luis Atok selaku Kepala Desa Kletek, beliau mengatakan bahwa⁹ :

Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu aspek yang sangat diperlukan dalam kegiatan yang ada di sebuah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Namun di desa kita ini penguasaan manajemen SDMnya masih sangat minim dalam hal kemampuan SDM dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan seperti kegiatan musrenbangdus dan musrenbangdes. Dari sini kita bisa melihat kemampuan SDM yang ada di desa kita ini, apakah aparat pemerintahnya aktif atau tidak dalam setiap kegiatan yang ada di desa.

Pernyataan yang hampir sama diungkapkan oleh Bapak Clemens Leki selaku Ketua BPD Desa Kletek, beliau mengatakan bahwa :

⁹ Wawancara dengan Bapak Yoseph Luis Atok selaku Kepala Desa Kletek, tanggal 04 September 2019

Mengenai kemampuan sumber daya manusia yang ada di desa ini sampai saat ini masih sangat rendah. Namun dari pemerintah desa selalu menegaskan kepada masyarakat Desa Kletek agar anak-anak yang masih duduk di tingkat SD maupun yang sementara berada di bangku perguruan tinggi, kita arahkan supaya jangan sampai anak-anak tersebut putus sekolah. Saya berharap agar ada kerja sama antara pemerintah desa bersama para masyarakat (orang tua) untuk terus memberikan dukungan moril terhadap anak-anak yang sementara berada dalam tahap pendidikan agar tetap melanjutkan pendidikannya sampai selesai paling kurang bisa mendapatkan ijazah sarjana, sehingga kedepannya nanti sumber daya manusia (SDM) yang ada di Desa Kletek ini bisa maju.¹⁰

Menurut pandangan bapak Petrus Bria selaku Masyarakat Desa Kletek, beliau mengatakan bahwa :

Mengenai sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat pemerintah desa Kletek, sejauh ini masih sangat minim sekali, sehingga dalam proses kegiatan seperti perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa yang dikelola kurang berjalan dengan efektif. Ini karena tingkat pendidikan kebanyakan dari aparat pemerintah desa kita ini hanya sampai pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dari semua aparat desa yang ada, yang memiliki ijazah SMA hanya kepala desa dengan sekretaris desa.¹¹

Menurut pandangan bapak Yosep Bere selaku Masyarakat Desa Kletek, beliau mengatakan bahwa :

Manajemen sumber daya manusia itu merupakan salah satu aspek penting yang harus ada dalam sebuah instansi pemerintahan. Tujuannya adalah untuk dapat meningkatkan kemajuan dalam instansi tersebut, karena jika SDM dalam sebuah instansi itu lemah maka dengan sendirinya juga instansi tersebut tidak akan berkembang. Hal ini dapat kita lihat juga di desa kita ini, dimana kebanyakan sumber daya manusia aparat desa yang ada di desa kita ini sangat minim, akibat rendahnya tingkat pendidikan, sehingga dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa itu kurang efektif.¹²

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan para informan tentang manajemen sumber daya manusia menunjukkan bahwa sumber daya manusia

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Clemens Leki selaku Ketua BPD Desa Kletek, tanggal 03 September 2019

¹¹ Wawancara dengan Bapak Petrus Bria selaku warga Desa Kletek, tanggal 04 September 2019

¹² Wawancara dengan Bapak Yosep Bere selaku warga Desa Kletek, tanggal 04 September 2019

yang dimiliki oleh aparat pemerintah desa kletek sampai saat ini masih sangat minim yang disebabkan oleh tingkat pendidikan aparat desa yang rendah sehingga berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan desa seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Hasil observasi yang dilakukan Peneliti menunjukkan bahwa memang tingkat pendidikan yang dimiliki Aparat Desa Kletek ini masih sangat minim. Dari semua aparat desa yang bekerja itu, yang memiliki ijazah paling tinggi adalah kepala desa dan sekretaris desa, ijazah yang dimiliki adalah ijazah SMA. Selain kepala desa dan sekretaris desa, aparat desa lainnya itu hanya dapat mengeyam pendidikan hingga sekolah menengah pertama dan sekolah dasar yang artinya hanya memiliki ijazah SMP dan SD. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 5.2
Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah
Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2018

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Yoseph Luis Atok	Kepala Desa	SMA
2	Martinus S. Berek	Sekretaris Desa	SMA
3	Afelinus Leki	KAUR Pemrintah	SD
4	Stefanus B Leto	KAUR Pembangunan	SD
5	Yohanes Mau	Kepala urusan Umum	SMP
6	Marcelinus D. Seran	Pamong Tani	SD
7	Moses Klau	Pamong Adat	SD
8	Petrus Mali	Pamong Tarantib	SD
9	Marcelinus N. Leki	Kadus Rainain	SD
10	Dominikus Tahu	Kadus Rainain A	SMP
11	Hendrikus Bau	Kadus Rainain B	SD
12	Herminus Klau	Kadus Suai A	SMP
13	Maria A Leki	Kadus Maneklaran	SD
14	Kanisius Nahak	Kadus Suai B	SD
15	Paulus Nahak	Kadus BeIdu	SMP
16	Juje Ferera	Kadus Wefatuk	SD

Sumber : Kantor desa Kletek Tahun 2018¹³

B.2 Manajemen Aset

Suatu teori baru dalam ilmu properti yang muncul akibat adanya kenyataan bahwa suatu wilayah khususnya Indonesia memiliki kekayaan sumber daya, baik sumber daya alam, manusia maupun infrastruktur. Bentuk manajemen aset ini memiliki dua bentuk yaitu aset terwujud dan aset tak berwujud. Aset terwujud itu adalah berupa bangunan, infrastruktur, mesin/peralatan dan fasilitas. Sedangkan aset tidak berwujud berbentuk organisasi. Aset tidak terwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

¹³ Sumber : Kantor desa Kletek Tahun 2018

Adapun hasil wawancara yang dilakukan antara peneliti bersama dengan informan sebagai berikut :

Hal yang diungkapkan oleh Bapak Yoseph Luis Atok selaku Kepala Desa Kletek, beliau mengatakan bahwa :

Salah satu aset yang dimiliki oleh Desa Kletek adalah berupa kendaraan dinas yang didapat dari kabupaten. Kendaraan dinas yang didapat digunakan desa untuk memperlancar urusan-urusan yang berkaitan dengan kebutuhan desa meskipun tidak dibiayai ADD. Kendaraan dinas ini mendapat biaya perawatan yang menggunakan anggaran yang bersumber dari ADD. Selain itu ada juga aset desa lainnya seperti printer, laptop, lemari arsip, meja setengah biro dan bangku kayu, sampai dengan saat ini semuanya masih dalam kondisi yang baik¹⁴.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Clemens Leki selaku Ketua BPD Desa Kletek, beliau mengatakan bahwa :

Semua aset milik pemerintah desa seperti laptop, printer, lemari arsip dan meja dibiayai dari dana ADD. Pemerintah desa menggunakan dana ADD untuk pengadaan semua aset tersebut di atas sebagai sarana dan prasarana yang ada di desa untuk menunjang keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah desa. Selain itu ada juga aset desa lainnya seperti printer, laptop, lemari arsip, meja setengah biro dan bangku kayu¹⁵.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Petrus Bria selaku Masyarakat Desa Kletek, beliau mengatakan bahwa :

Di desa kita ini memiliki banyak aset. Namun kalau kita berbicara tentang aset desa yang dibiayai oleh dana ADD itu dan yang kami tahu selama ini masih terbatas pada pengadaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa seperti laptop, printer, lemari arsip, meja dan bangku¹⁶.

Berikut merupakan beberapa manajemen aset yang dimiliki oleh pemerintah Desa Kletek yang di danai oleh dana alokasi dana desa.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Yoseph Luis Atok selaku Kepala Desa Kletek, tanggal 04 September 2019

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Clemens Leki selaku Ketua BPD Desa Kletek, tanggal 03 September 2019

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Petrus Bria selaku warga Desa Kletek, tanggal 04 September 2019

Gambar 5.1
Inventaris Desa Kletek Meja Setengah Biro dan Bangku Kayu



Sumber : Kantor desa Kletek Tahun 2018¹⁷

Gambar 5.1 merupakan salah satu inventaris aset desa yang dimiliki oleh pemerintah Desa Kletek seperti meja setengah biro yang dibeli atau diadakan dengan menggunakan dana dari ADD. Inventaris berupa meja setengah biro ini diadakan menggunakan alokasi dana desa tahun 2016 dengan total biaya Rp. 900.000 untuk 3 meja setengah biro.

¹⁷ Sumber : Kantor desa Kletek Tahun 2018

Gambar 5.2
Inventaris Lemari Arsip Desa



Sumber : Kantor desa Kletek Tahun 2018¹⁸

Gambar 5.2 menunjukkan aset milik desa berupa lemari arsip yang dibiayai oleh dana ADD. Lemari arsip desa ini dibeli oleh pemerintah desa dengan harga Rp. 3.000.000, dan lemari ini digunakan untuk menyimpan semua berkas yang berkaitan dengan kelengkapan arsip desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, menunjukkan bahwa semua aset desa yang dibiayai dengan Alokasi Dana Desa secara manajemen diperuntukan sesuai dengan fungsinya dalam menunjang keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa juga keberlangsungan hidup masyarakat desa Kletek. Pemerintah Desa Kletek dan juga masyarakat desa memiliki peranan yang

¹⁸ Sumber : Kantor desa Kletek Tahun 2018

sangat bagus dengan menjaga dan memelihara aset-aset yang ada sampai saat ini. Aset-aset desa berwujud yang dibiayai Alokasi Dana Desa seperti printer, laptop, lemari arsip, meja setengah biro dan bangku kayu, semuanya masih dalam kondisi terawat dengan baik.

C. Kemampuan Teknis

Aspek kemampuan teknis adalah teknik yang digunakan atau dimiliki untuk membuat sesuatu dapat lebih berguna dan bermanfaat. Kemampuan teknis mempunyai dua indikator yaitu : 1) Mampu menyusun administrasi keuangan desa, 2) Mampu menyusun rencana APBDes dan penggunaan ADD.

Pemerintah desa memiliki fungsi, menyelenggarakan rumah tangga desa, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, melaksanakan pembinaan perekonomian desa, melaksanakan pembinaan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan dan lain sebagainya. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik perangkat desa sebagai pembantu kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan teknis yang memadai, baik itu kemampuan teknis administrasi desa maupun kemampuan menyusun APBDes dan penggunaan ADD.

C.1 Mampu menyusun administrasi keuangan desa.

Pemerintah desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, kepala desa berwenang melaksanakan administrasi pemerintahan

desa. Secara teknis kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai aparatur pelaksana administrasi desa. Yang dimaksud dengan administrasi pemerintah desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintah desa pada buku register desa.

Adapun penjabaran dari hasil wawancara antara peneliti bersama dengan informan tentang kemampuan menyusun administrasi keuangan desa. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti bersama informan mengenai kemampuan aparat desa dalam menyusun administrasi keuangan desa sebagai berikut :

Hal yang diungkapkan oleh Bapak Yoseph Luis Atok selaku Kepala Desa Kletek yang menyatakan bahwa :

Mengenai penyusunan administrasi desa, kami telah melakukan pembagian tugas di setiap bidang. Di mana saya sebagai kepala desa tugas saya adalah sebagai penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan desa. Sedangkan tugas dari seorang sekretaris adalah sebagai pelaksana pengelolaan administrasi desa, bendahara sebagai orang yang menangani keuangan desa dan pelaksanaan teknis desa dilaksanakan oleh para kaur¹⁹.

Menurut Bapak Afelinus Leki selaku Kaur Keuangan Desa Kletek, beliau menyatakan bahwa :

Dalam penyusunan administrasi desa, aparat desa yang ada telah mempunyai tanggungjawabnya masing-masing. Penyusunan administrasi desa ini dilakukan agar aparat desa dapat bekerja sesuai dengan tugas dan kemampuannya masing-masing. Penyusunan administrasi desa yang dilakukan diantaranya adalah administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, administrasi pembukuan dan administrasi BPD²⁰.

Menurut pandangan Bapak Yosep Bere selaku Masyarakat Desa Kletek, beliau mengatakan bahwa :

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Yoseph Luis Atok selaku Kepala Desa Kletek, tanggal 04 September 2019

²⁰ Wawancara dengan Afelinus Leki selaku Kaur Keuangan Desa Kletek, tanggal 04 September 2019

Penyusunan administrasi desa dilakukan agar aparat desa itu melaksanakan tugas mereka sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan itu seperti kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat maupun yang tidak ada kaitannya dengan masyarakat. Sementara itu contohnya dalam melakukan penyusunan administrasi kependudukan itu hanya dikhususkan pada pencatatan-pencatatan yang bersangkutan dengan penduduk desa²¹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa dalam penyusunan administrasi desa itu Pemerintah Desa Kletek sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pembagian tugas kepada aparat pemerintah desa yang sesuai dengan kemampuan masing-masing aparat. Sementara itu juga aparat pemerintah desa juga dituntut untuk dapat menguasai semua bidangnya masing-masing baik yang berkaitan dengan administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, administrasi pembangunan maupun administrasi yang berkaitan dengan badan permusyawaratan desa.

C.2 Mampu menyusun rencana APBDes dan penggunaan ADD

Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDes. Penyusunan APBDes berdasar pada RKPDDes, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan desa (perdes). Dengan demikian APBDes, yang juga ditetapkan dengan perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.

²¹ Wawancara dengan Bapak Yosep Berek selaku Masyarakat Desa Kletek, tanggal 04 September 2019

Adapun penjabaran dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan tentang mampu menyusun rencana APBDes dan Penggunaan ADD sebagai berikut :

Hal yang diungkapkan oleh Bapak Yoseph Luis Atok selaku Kepala Desa Kletek yang menyatakan bahwa :

Sedangkan untuk penyusunan rencana APBDes sendiri, sumber daya manusia (aparatur desa) yang kita punya saat ini masih sangat minim pengetahuannya, maka pada saat penyusunan APBDes kita selalu melakukan *copy paste* dari APBDes desa lain, untuk dapat kita lakukan penyusunan APBDes di desa kita ini. Selain kita mengcopy paste APBDes milik desa lain, kita juga bisa menggunakannya sebagai bahan referensi untuk aparat desa kita agar dapat mempelajari teknik penyusunan APBDes yang benar sehingga di tahun berikutnya kita tidak lagi mengcopy paste APBDes milik desa lain.

Mengenai soal pengelolaan ADD pemerintah desa sudah menjalankannya dengan baik, walaupun sumber daya manusia kurang tapi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa masih berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilihat dari Alokasi Dana Desa yang dipakai sebesar Rp. 342,888,000²².

Menurut Bapak Afelinus Leki selaku Kaur Keuangan Desa Kletek, beliau menyatakan bahwa:

Dalam penyusunan rencana APBDes yang berada di Desa Kletek yang saya lihat selama ini kurang maksimal, hal ini disebabkan karena tingkat pengetahuan dan sumber daya manusia sangat kurang. Jadi menurut saya langkah yang harus diambil oleh pemerintah desa adalah lebih banyak memberikan lagi pelatihan-pelatihan mengenai penyusunan rencana APBDes dan penggunaan ADD²³.

Menurut pandangan bapak Yosep Bere selaku Masyarakat Desa Kletek, beliau mengatakan bahwa :

“Sejauh ini proses penyusunan rencana APBDes yang berada di Desa Kletek ini masih sangat minim, hal ini karena pemerintah desa masih belum

²² Wawancara dengan Bapak Yoseph Luis Atok selaku Kepala Desa Kletek, tanggal 04 September 2019

²³ Wawancara dengan Afelinus Leki selaku Kaur Keuangan Desa Kletek, tanggal 04 September 2019

transparan dengan masyarakat terhadap penyusunan APBDes dan penggunaan ADD”²⁴.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan menunjukkan bahwa dalam menyusun rencana APBDes dan penggunaan Alokasi Dana Desa pemerintah Desa Kletek masih belum maksimal. Kemampuan teknis yang sebenarnya dibutuhkan dalam menyusun rencana APBDes dan penggunaan ADD tidak berjalan dengan lancar disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang masih sangat minim. Sedangkan dalam penyusunan administrasi desa pemerintah desa telah melakukannya dengan baik dimana penyusunan organisasi desa dan pembagian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang telah ditetapkan. Selain itu dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut informan, mereka mengatakan bahwa pengelolaannya sudah berjalan dengan baik walaupun di desa sumber daya aparat desanya masih sangat minim, hal ini dapat dilihat dari serapan dana dari alokasi dana desa dengan jumlah dana sebesar Rp.342,888,000.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Yosep Bere selaku Masyarakat Desa Kletek, tanggal 04 September 2019